

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengarahkan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tetapi keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan negara tersebut. Setiap negara pasti selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan akan menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan pengangguran (Latipah & Inggit, 2017)

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan dapat dinikmati oleh semua pihak (Sukirno, 2011). Salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan ditandai dengan sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi, seperti adanya kesempatan kerja yang diciptakan dari kegiatan pembangunan ekonomi. Karena mengingat manusia berperan sebagai roda penggerak pembangunan, kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat proses pembangunan ekonomi (Pangesti & Prawoto, 2018).

Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun akan menyebabkan bertambahnya konsumsi setiap tahun sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan disertai pengangguran (Tambunan, 2009).

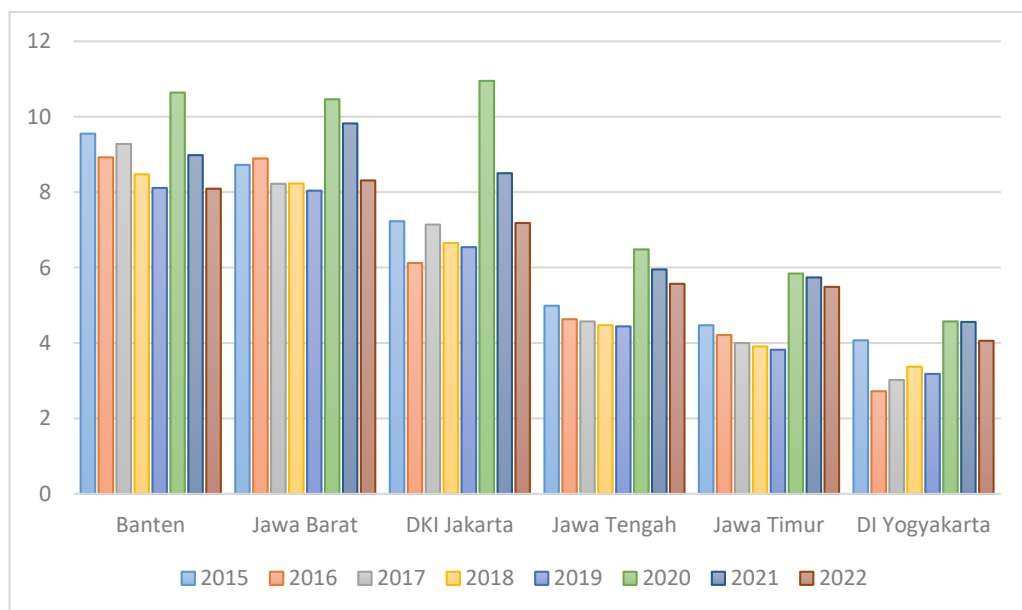
Menurut Keynes, pengangguran dapat diatasi melalui peningkatan permintaan agregat. Meningkatnya permintaan akan mendorong kinerja sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan output. Hal ini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini berarti, jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin banyak output nasional akan membuat lebih banyak orang yang bekerja, sehingga seharusnya dapat mengurangi pengangguran (Rasyida, 2021)

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Provinsi di Pulau Jawa (%)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banten	5.40	5.26	5.75	5.77	5.26	-3.39	4.44	5.03
Jawa Barat	5.04	5.67	5.33	5.63	5.02	-2.52	3.74	5.45
DKI Jakarta	5.89	5.85	6.20	6.11	5.82	-2.39	3.56	5.25
Jawa Tengah	5.47	5.28	5.26	5.30	5.36	-2.65	3.32	5.31
Jawa Timur	5.44	5.55	5.46	5.47	5.53	-2.33	3.57	5.34
DI Yogyakarta	4.95	5.05	5.26	6.20	6.59	-2.68	5.53	5.15

Sumber: PDRB Provinsi di Indonesia

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, Provinsi Banten memiliki potensi yang menakjubkan. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2015-2019 adalah berfluktuasi tetapi tetap stabil di angka 5%. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan di angka -3.39%. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan hingga berada diangka 4.44%. Angka tersebut merupakan laju pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa Setelah Provinsi DI Yogyakarta. Namun, distribusi PDRB Provinsi Banten terhadap PDRB nasional masih terbilang rendah, yakni hanya sebesar 3-4%. Begitu juga dengan pengangguran di Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Jawa (Persen)

Pembangunan ekonomi di provinsi Banten masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Pertumbuhan angkatan kerja selalu lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga masalah pengangguranpun tidak dapat dihindari. Berdasarkan data pada Gambar 1.1 yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dari tahun 2015-2019 merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, yakni di angka 8-9%. Di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 8.11% di tahun 2019, menjadi 10.64%. Kemudian di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 8.98% dan 8.09, akan tetapi angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, bahkan lebih tinggi dari TPT nasional yang diangka 5.86% pada tahun 2022. Jika sesuai teori seharusnya jika pertumbuhan ekonomi bagus atau meningkat, hal tersebut dapat menurunkan pengangguran. Tetapi di Provinsi Banten, pertumbuhan ekonominya sudah cukup bagus yakni sebesar 4.44% dimana angka tersebut lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 3.69%, namun angka penganggurannya masih tinggi.

Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan yaitu faktor permintaan (dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi) dan faktor penawaran (ditentukan oleh perusahaan struktur penduduk). Penyerapan tenaga kerja tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi, dengan ini terdapat jumlah orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu sektor usaha (M & Priana, 2022).

Todaro (2006) berpendapat bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana

mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Tenaga kerja yang telah bekerja terserap dalam berbagai sektor perekonomian yang ada, dimana sektor – sektor tersebut tentunya menghasilkan barang maupun jasa dalam jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi tersebut menimbulkan perbedaan dalam tingkat produktivitas maupun dalam kontribusinya bagi pendapatan nasional (Latipah & Inggit, 2017).

Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Menurut Dumairy (1996), sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial memiliki "dasar tukar" (term of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan, serta menciptakan nilai tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja (Rochman et al., 2017).

Pembangunan ekonomi nasional maupun daerah diwujudkan pada usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut (Simanjuntak, 2010), permintaan akan tenaga kerja didasarkan atas kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Kontribusi PDRB yang besar yang dimiliki oleh suatu sektor

ataupun daerah seharusnya memiliki dampak dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disisi lain juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai (Syafri & Zulfanetti, 2018).

Tabel 1. 2 Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Banten Tahun 2015-2022

Tahun	Pertanian,Kehutanan, Perikanan		Industri Pengolahan		Perdagangan Besar dan Eceran	
	Presentase PDRB	Tenaga Kerja	Presentase PDRB	Tenaga Kerja	Presentase PDRB	Tenaga Kerja
2015	5.87	628,047	33.52	1,188,766	12.37	1,189,908
2016	6.02	706,126	32.57	1,116,989	12.18	1,207,701
2017	5.90	675,738	31.93	1,246,230	12.29	1,203,637
2018	5.80	743,767	31.26	1,251,525	12.49	1,032,645
2019	5.60	590,053	30.74	1,314,664	12.74	1,159,442
2020	6.23	688,509	31.21	1,128,392	13.33	1,259,785
2021	6.04	632,323	31.48	1,185,317	12.90	1,331,332
2022	5.90	670,880	30.47	1,368,588	12.52	1,240,325

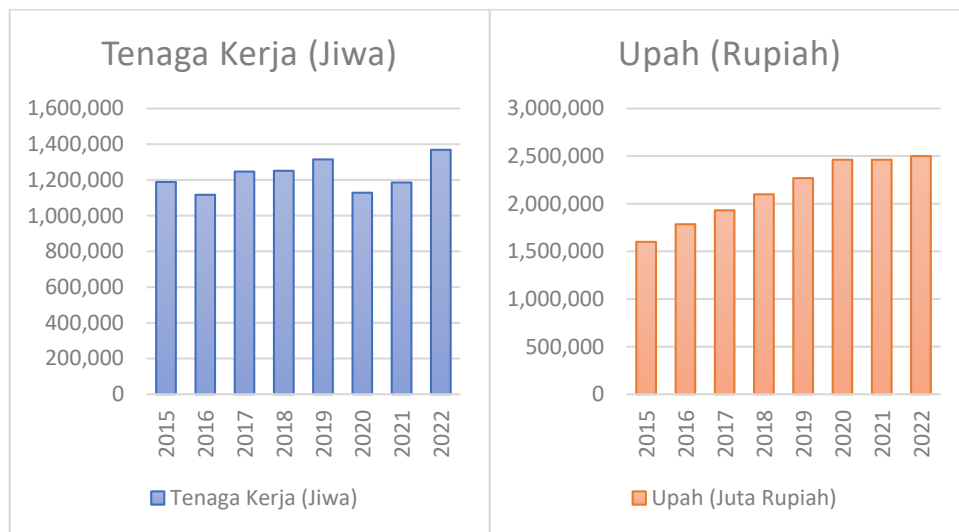
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka dan Badan Pusat Statistik

Dilihat dari Tabel 1.2, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar untuk total PDRB Provinsi Banten yakni diangka 30% keatas dari tahun 2015-2022. Dibandingkan dengan sektor perdagangan besar yang menyumbang sebesar 12-13% serta sektor pertanian diangka 5-6% untuk PDRB Provinsi Banten. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan lebih sedikit dibandingkan dengan sektor perdagangan. Seperti yang terjadi di tahun 2015-2016 dan juga di tahun 2020-2021. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori, seharusnya sektor industri mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sektor perdagangan. Karena presentase PDRB sektor industri pengolahan jauh lebih tinggi daripada sektor perdagangan.

Selain itu, ada kondisi dimana saat kontribusi PDRB sektor industri turun, penyerapan tenaga kerjanya malah naik. Hal tersebut terjadi pada tahun 2017-2019. Kemudian hal sebaliknya terjadi pada tahun 2020, yakni dimana kontribusi PDRB sektor industri naik, akan tetapi penyerapan tenaga kerjanya malah menurun. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan peningkatan besaran PDRB dengan kenyataan penyerapan tenaga kerja dilapangan.

Bentham menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara lain melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Nilai upah yang diberikan kepada pekerja telah memiliki pedoman dari pihak pemerintah wilayah tersebut yang dikenal dengan sebutan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten yang berlaku. Upah dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi pengusaha atau produsen, upah merupakan biaya yang harus dikeluarkan sehingga ikut menentukan tinggi rendahnya biaya total. Dari sisi pekerja, upah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil menyumbangkan tenaganya kepada pengusaha atau produsen (Sudarsono, 1998).

Dalam hal pemberian upah sering menjadi kontroversi dalam bidang ketenagakerjaan. Terkadang peningkatan upah minimum menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penyerapan tenaga kerja. Karena pada dasarnya jika upah minimum Provinsi/Kabupaten naik, pihak pelaku usaha akan meminimalkan biaya operasionalnya untuk mengantisipasi pengeluaran biaya ditahun kedepannya dengan melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghemat pengeluaran dan demi tercapainya laba optimum (Sumarsono, 2009).



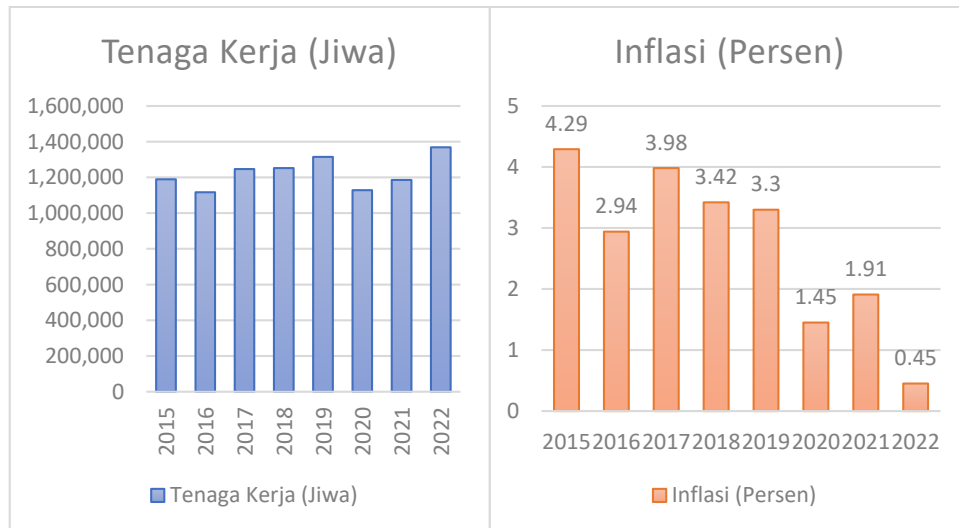
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka

Gambar 1. 2 Grafik Upah Minimum dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Banten Tahun 2015-2022

Berdasarkan Gambar 1.2, Upah Minimum Provinsi Banten dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami peningkatan, dan ditahun 2021 tidak mengalami perubahan. Kemudian jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan justru mengalami fluktuasi. Dimana dengan naiknya UMP tidak serta merta terjadi penurunan jumlah tenaga kerja, tetapi justru naiknya UMP cenderung diikuti dengan naiknya penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan. Penurunan jumlah tenaga kerja hanya terjadi di tahun 2016 dan 2020. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara meningkatnya upah dengan kenyataan jumlah penyerapan tenaga kerja dilapangan.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya memperhatikan pada tingkat upah saja, bahkan bisa juga memperhatikan perihal tinggi atau rendahnya tingkat inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga berlaku secara umum dan terus menerus dalam satu periode tertentu (Warapsari et al., 2020). Tinggi rendahnya inflasi membuat perusahaan untuk lebih mempertimbangkan dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Karena jika keadaan inflasi tinggi, maka akan membuat harga-harga

faktor produksi menjadi lebih mahal, sehingga akan berdampak pada penurunan faktor produksi termasuk tenaga kerja. Sedangkan pada tingkat yang rendah dan stabil, inflasi memberikan efek positif bagi perekonomian (M & Priana, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 Grafik Inflasi Tahun ke Tahun dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Banten Tahun 2015-2022

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa inflasi di Provinsi Banten pada tahun 2015-2022 cenderung mengalami penurunan. Yang dimana seharusnya dengan penurunan inflasi tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten ada yang tidak sesuai dengan teori. Yakni pada tahun 2016 dan 2020, turunnya inflasi justru diikuti dengan turunnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Kemudian ada juga kondisi dimana pada tahun 2017 dan 2021 saat inflasi naik, justru penyerapan tenaga kerja juga naik, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan teori tentang inflasi dengan kondisi lapangan.

Berdasarkan pada uraian dan data-data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah kajian tentang penyerapan tenaga kerja sektor industri yang penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul

“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Banten Tahun 2015-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Inflasi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan tujuan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Inflasi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pembangunan dan menjadi bahan tambahan informasi rujukan dan referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Terutama penelitian yang berhubungan dengan masalah penyerapan tenaga kerja khususnya sektor industri. Serta diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan objek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan latihan dalam menerapkan serta mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja khususnya sektor industri

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam rangka pemenuhan penyerapan tenaga kerja khususnya sektor industri, serta sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan industri di Provinsi Banten.